



Penelitian ini menelaah strategi legitimasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam konteks keterlibatannya dengan Indonesia. Berdasarkan kerangka teoritis Tallberg dan Zürn (2019), studi ini menganalisis tiga dimensi utama legitimasi -otoritas, prosedural, dan kinerja- serta bagaimana ketiganya digunakan secara diskursif untuk membangun dan mempertahankan kredibilitas institusional. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif, penelitian ini menelusuri narasi, dokumen publik, dan tanggapan masyarakat sipil terkait proyek-proyek AIIB di Indonesia, khususnya Proyek Infrastruktur Pariwisata Mandalika yang menjadi titik uji bagi klaim legitimasi Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIIB memanfaatkan legitimasi prosedural dan kinerja untuk menegaskan diri sebagai lembaga multilateral yang efisien, transparan, dan responsif, sekaligus meredam skeptisisme terhadap pengaruh Tiongkok. Namun, kasus Mandalika memperlihatkan bahwa legitimasi bersifat rapuh dan harus terus dikelola: kritik terhadap hasil proyek dan mekanisme perlindungan sosial dapat dengan cepat menggoyahkan otoritas dan kredibilitas institusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi AIIB bersifat dinamis dan adaptif, dibentuk melalui proses *self-legitimation* yang terus-menerus di tengah tekanan geopolitik dan kontestasi publik.

**Kata kunci:** AIIB, legitimasi, organisasi internasional, Mandalika, Indonesia.



This thesis examines the legitimacy-building strategies of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in its engagement with Indonesia. Drawing on Tallberg and Zürn's (2019) framework, the study explores how the Bank constructs and defends legitimacy through three interrelated dimensions -authority, procedure, and performance. Using a qualitative case study approach, it analyzes institutional discourse, policy documents, and civil society responses surrounding AIIB's operations in Indonesia, with particular focus on the Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project as a key site of legitimacy contestation. Findings reveal that AIIB relies primarily on procedural and performance legitimacy to present itself as a transparent, efficient, and rule-based multilateral bank while mitigating skepticism about Chinese influence. Yet the Mandalika case demonstrates that legitimacy is fragile and continuously negotiated: challenges to project outcomes and safeguard credibility can quickly undermine institutional authority. The study concludes that AIIB's legitimacy is not a fixed attribute but a dynamic and adaptive process of self-legitimation, offering broader insights into how new multilateral development banks navigate reputation and credibility in contested global governance environments.

**Keywords:** AIIB, legitimacy, international organizations, Mandalika, Indonesia.